

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikat di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang, dan bagaimana akibat hukum pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikat di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini di kantor Kelurahan Tambakrejo, kantor Kecamatan Gayamsari Semarang dan rumah warga. Jenis data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi bahan pustaka dalam hal ini bahan pustaka yang digunakan adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikat di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang didapatkan bahwa masih ditemukan pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikat, menurut masyarakat di Kelurahan Tambakrejo tersebut bahwa jual beli tanah tanpa sertifikat dan hanya dengan menggunakan kwitansi dirasa sudah cukup karena apabila mengurus sertifikat tersebut harus memiliki biaya yang mahal dan prosesnya yang lebih rumit. Transaksi jual beli tanah tanpa sertifikat yaitu menggunakan selebar kwitansi. Akibat hukum dari jual beli tanah tanpa sertifikat di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang tetap sah, akan tetapi untuk legalitasnya belum sah karena tidak ada sertipikat.

Kata Kunci: Jual beli tanah, Pelaksanaan, Tanpa sertifikat

ABSTRACT

This study aims to determine how the implementation of land sale and purchase without certificates in the Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang, and how the legal consequences of the implementation of the sale and purchase of land without certificates in the Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang.

This research is a descriptive empirical legal research type using qualitative methods. The location of this research is in the Tambakrejo Village office, the Gayamsari District office in Semarang and the residents' homes. The type of data used is primary data as primary data and sources and secondary data sources. Data collection techniques used are interview techniques and laws and regulations. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques using interactive methods.

Based on the results of the research and analysis carried out, it can be seen that the implementation of land sale and purchase without a certificate in the Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang found that there were still land sales and purchases without certificate, according to the people in Tambakrejo Village, that buying and selling land without certificate and only using a receipt this is enough because processing the certificate must be expensive and the process is more complicated. Land sale and purchase transactions without certificates, namely using a receipt. The legal consequences of the sale and purchase of land without a certificate in Tambakrejo Village, Gayamsari District, Semarang are still valid, but for legality it is not yet valid because there is no certificate.

Keywords: Sale and Purchase of land, Implementation, Without Certificates